

**THE EFFECT OF GRDP, NUMBER OF POPULATION AND INFLATION  
ON REGIONAL TAX REVENUE  
IN MODERATED DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE  
IN THE CITY OF SEMARANG 2015-2019**

**Devi Ageliana<sup>1)</sup>, Arditya Dian Andika<sup>2)</sup>, Patricia Dhiana Paramita<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pandanaran Semarang

<sup>2), 3)</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pandanaran Semarang

**ABSTRACT**

*Semarang City's local tax revenue in 2015-2019 experienced problems, where there was fluctuation between the budget and its realization. This is assumed to be motivated by the fluctuating GDP, population and inflation in the city of Semarang. The purpose of this study was to determine the effect of GRDP, population and inflation on local tax revenues in the city of Semarang partially and simultaneously and to determine whether infrastructure development moderates the effect of GRDP, population and inflation partially on local tax revenues in the city of Semarang.*

*The population in this research is all reports related to GRDP, population and inflation, Regional Tax Revenues and infrastructure development in Semarang City from 2015 to 2019. The data analysis techniques used are 2-Stage Multiple Linear Regression and Moderated Regression Analysis (MRA).*

*The results of the analysis show that the GRDP and total population partially have a positive and significant effect on local tax revenues in the city of Semarang, while inflation has a negative and significant effect on local tax revenues in the city of Semarang. Infrastructure development partially moderates the influence of GRDP, population and inflation on local tax revenues in the city of Semarang.*

**Keywords:** *GRDP, population, inflation, infrastructure development and local tax revenue in Semarang City.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha untuk memanfaatkan potensi setiap daerah secara penuh. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan peluang dan tantangan persaingan global di pusat dan daerah dan hubungan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta sistem pemerintahan nasional yang terintegrasi. (UU No.23 Th.2014 mengenai Pemerintahan Daerah).

Sebagai daerah otonom, Provinsi Jawa Tengah tidak bergantung pada pemerintah pusat atau daerah karena setiap kabupaten dan kota diberikan sumber keuangannya sendiri. Sumber pembiayaan terpenting adalah Pendapatan Asli Daerah (Haniz dan Sasan : 2013).

**Tabel 1**  
**Belanja Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**(Dalam Rupiah)**

Keterangan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
2015	192.530.351,34	288.277.979,70
2016	362,445,591,69	477,889,286,68
2017	484,241,614,41	449,509,524,06
2018	531.309.873.39	396.319.622.78
2019	543.745.239.65	279.970.188.46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Semarang, 2015-2019 (2020)

Sumber pembiayaan terpenting adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD adalah pendapatan asli daerah untuk melaksanakan program otonom daerah, dan naik turunnya PAD mempengaruhi keberhasilan otonom daerah (Saputra, 2014), Terlepas dari

pendapatan asli daerah, otonom daerah bisa berjalan secara optimal. Jadi, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin cepat pula perkembangan daerah tersebut dan semakin sejahtera penduduknya.

PAD memiliki sejumlah bagian, seperti : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disortir, dan PAD legal lainnya. Diantara bagian PAD, Pajak dan retribusi daerah diharapkan bisa memberi kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan PAD (Kusuma : 2013).

Pajak daerah juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor : jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Semua faktor ini berubah setiap tahun dan bisa digunakan untuk memprediksi PAD (Arianto : 2014).

Peningkatan PDRB adalah dampak dari meningkatnya kegiatan ekonomi. Seiring dengan peningkatan standar hidup masyarakat, Hal ini juga bisa meningkatkan masyarakat berpenghasilan tinggi, meningkatkan PAD karena sektor pajak daerah ada dalam PDRB.

**Tabel 2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang 2015-2019**

Tahun	PDRB	+/-
2015	Rp 109.110.689,61	+
2016	Rp 115.542.560,57	+
2017	Rp 123.279.891,91	+
2018	Rp 131.317.631,74	+
2019	Rp 140.326.256,85	+

Sumber: BPS Kota Semarang 2015- 2019, 2020.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap PAD, sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dengan menambah jumlah penduduk di suatu daerah diperkirakan PAD akan meningkat di masa mendatang. Jadi, pertumbuhan penduduk secara langsung

mempengaruhi PAD (Saputra, dkk, 2014)

Bertambahnya penghasilan masyarakat ini harus sejajarkan dengan ketersediaan barang dan jasa. Inflasi terjadi saat harga barang dan jasa menaik. Oleh karena itu, maka ini bisa berdampak langsung pada situasi ekonomi dan kesadaran wajib pajak yang lebih rendah. (Saputra, Sudjana dan Djudi, 2014). Dengan hal tersebut, Pemerintah dimohon bisa memperhatikan stabilitas ekonomi dengan memperhatikan inflasi tetap rendah sehingga PAD dapat optimal.

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2015-2019 Kota Semarang**

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	1.776.618 Jiwa
2016	1.648.279 Jiwa
2017	1.658.552 Jiwa
2018	1.668.578 Jiwa
2019	1.674.358 Jiwa

Sumber : Dispenducapil Kota Semarang, 2020

Inflasi yang terjadi bisa berpengaruh dengan jumlah penerimaan pajak. Salah satu upaya untuk mendapatkan pengeluaran yang cepat adalah dengan cara melakukan pembangunan untuk atasi pengangguran dan konsumsi modal yang sangat rendah.

**Tabel 4**  
**Tabel Pertumbuhan Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2015-2019**

Kota	Inflasi Per Bulan Desember (Persen) Kota Semarang				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Semarang	1,04	0,2	0,68	0,36	0,46
+/-	-	-	+	-	+

Sumber : BPS Kota Semarang, 2015-2019,2020

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Merissa Widya Sari & Sugiarto (2015), dimana hasilnya PDRB Berpengaruh Positif dan tidak signifikan PDRB terhadap Penerimaan Pajak. Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Fitriawati Ilyas (2016), yang hasilnya Jumlah Penduduk Tidak berpengaruh Positif terhadap penerimaan pajak. Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, yang dilakukan oleh Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Muttaqin (2018), hasilnya Inflasi Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB terhadap Pembangunan Infrastruktur, yang dilakukan oleh I Ketut Sumadiasa, Ni Made Tisnawati, I G.A.P Wirathi (2017), hasilnya PDRB Berpengaruh positif, tidak Signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur. Penerimaan terhadap Pembangunan Infrastruktur, yang dilakukan oleh Dian Andrianya, & Riatu Mariatul Qibthiyaha, (2018), hasilnya penerimaan pajak Berpengaruh Positif terhadap pembangunan infrastruktur.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Kodya Semarang meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur.

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
4. Mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi secara simultan

- terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
5. Mengetahui pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
  6. Mengetahui pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
  7. Mengetahui pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Dalam pengembangan mentari Ajzen (2017) teori tindakan rasional menjadi teori lain yaitu teori perilaku terencana, yang menunjukkan hubungan antara tindakan yang diajukan oleh pribadi dalam menyikapi sesuatu.

Menurut teori perilaku perencanaan Kurniawati dan Toly (2014), terdapat tiga penyebab yang dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan yang dilakukan daripada pribadi yaitu:

#### 1) *Behaviorial Belief*

Yaitu kepercayaan dari suatu penilaian terhadap hasil perilaku. Percayalah bahwa hasil dari perilaku akan membentuk sikap.

#### 2) *Normative Belief Normative belief*

Yaitu Motivasi dari orang lain memengaruhi perilaku orang tersebut.

#### 3) *Control Belief Control belief*

Yaitu kepercayaan pribadi berlandaskan perilaku masa lalu dan hal-hal yang mendukung atau menghalangi pemikiran mereka.

## INFRASTRUKTUR

Menurut Ilham (2021) Infrastruktur yaitu segala fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat atau perusahaan untuk menunjang beragam

aktivitas masyarakat atau perusahaan pada kehidupan sehari-hari, termasuk fasilitas fisik dan sosial. Infrastruktur didirikan pemerintah atau perseorangan atau perusahaan sehingga dapat mencukupi kebutuhan pokok dari masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial.

Ada beberapa jenis infrastruktur yang dirancang untuk melayani masyarakat, menurut Ilham (2021) sebagai berikut :

#### 1) Infrastruktur Keras

##### *(Physical Hard Infrastructure)*

Infratraktur keras adalah infratraktur dengan berbentuk atau berwujud yang riil, dan cara penggunaannya berdasarkan dari bentuk fisiknya. Infrastruktur keras berkaitan dengan keperluan publik. Contoh infrastruktur keras diantaranya sarana transportasi baik darat, laut maupun udara, jalan-raya, saluran serta bangunan.

#### 2) Infrastruktur Keras Non Fisik (*Non Physical Hard Infratructure*)

Infrastruktur keras non fisik sama halnya tanpa bentuk riil, tapi sangat bermanfaat dan mendorong keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik berkaitan dengan masalah kebahagiaan masyarakat.

#### 3).Infrastruktur Lunak(*Soft Infrastructure*)

Infrastruktur lunak yaitu Infrastruktur yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Infrastruktur ini dibangun dengan melihat beragam nilai serta norma-norma, seperti nilai budaya, norma hukum, agama, serta norma lainnya.

Rencana Pembangunan Infrastruktur di Kota Semarang, Sesuai peraturan presiden no.79 th.2019, sumber pendanaan infrastruktur Rp 52 triliun di Kota Semarang merupakan hasil dari APBN, APBD, yang berkerja sama Pemerintahan dengan Badan Usaha, dan sumber-sumber dari pembiayaan lainnya.

## **PENERIMAAN PAJAK**

Berdasarkan pengertian perpajakan dalam UU No.16 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tahun 2009: "Pajak ialah pemberian wajib yang terhutang oleh wajib pajak yang diwajibkan oleh UU dan tanpa diberikan kompensasi secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat."

## **PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

Menurut Ebook "Pajak Daerah", 2018 fungsi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran merupakan fungsi yang penting dalam pajak daerah, karena untuk mengisi kas daerah yang digunakan pemerintah daerah guna menampung dana dari masyarakat untuk keperluan dana pembangunan daerah.
2. Fungsi pengawasan merupakan fungsi perpajakan yang berkaitan dengan pemerintah daerah bisa gunakan pajak daerah untuk capai tujuan tertentu. Sehingga pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang maupun jasa.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum supaya bisa dipungut secara efisien. Ada beberapa prinsip dasar perpajakan yang baik menurut Ebook "Pajak Daerah", 2018, diantaranya :

### 1) Prinsip keadilan (*fairness*)

Dalam prinsip tersebut perpajakan tidak akan membedakan antara wajib pajak dengan mempunyai keahlian yang bersamaan. Pajak ini dipungut atas pajak harus memenuhi batas keahlian, sehingga berdasarkan prinsip keadilan ini setiap wajib pajak dengan keahlian yang sama harus membayar pajak yang sama, dan wajib pajak dengan keahlian berbeda akan diberikan nilai pungutan yang berbeda.

### 2) Prinsip Kepastian (*Certainty*).

Prinsip kepastian pajak daerah seperti dasar hukum pengaturan perpajakan, materi yang terkait kepastian tarif/jumlah dan dasar pengambilan pajak, serta kepastian tata caranya. Kepastian akan memastikan bahwa setiap orang dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah tanpa bimbang, karena semuanya sudah diatur jelas.

### 3) Prinsip Kemudahan (*Convenience*).

Pembayaran pajak daerah hanya dibayarkan setelah wajib pajak menerima penghasilannya. Dengan begitu, jika wajib pajak tidak mampu membayar, negara tidak akan memungut pajak daerah.

### 4) Prinsip efisiensi (*Efficiency*).

Pada prinsip ini, jumlah pemungutan dana pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak. Pungutan dan administrasi pajak daerah harus melihat metode yang bisa memberikan pendapatan pajak terbesar dan biaya terkecil.

Standar tentang pajak daerah menurut Ebook "Pajak Daerah", 2018 yaitu:

- 1) Bersifat Pajak Dan Bukan Retribusi. Pajak dan retribusi harus sesuai dengan fungsi perpajakan yang diatur oleh UU dan termasuk pajak wajib yang di bayarkan oleh wajib pajak ke daerah.:
  - Tidak ada kompensasi setara langsung
  - Dapat dilaksanakan sesuai regulasi
  - Digunakan pemerintahan untuk mendanai infrastruktur daerah.
- 2) Objek pajak berada didaerah yang ada kaitannya, memiliki pergerakan yang minim, serta melakukan pelayanan masyarakat didaerah yang berkaitan.
- 3) Tujuan dan dasar pemberian pajak tidak berlawanan dengan kepentingan umum. Pajak bertujuan sebagai mewujudkan kepentingan bersama-

- sama antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Obyek pajak bukan Obyek pajak pusat. Pajak yang melanggar standar tersebut yaitu pajak ganda.
  - 5) Tidak ada dampak negatif terhadap perekonomian. Perpajakan tidak akan mengganggu sumber daya ekonomi, dan juga tidak akan menghambat aliran sumber daya ekonomi antar daerah aktivitas ekspor dan import.
  - 6) Mencermati keadilan dan kesanggupan masyarakat.
  - 7) Dalam hal kemampuan wajib pajak, pajak mengacu pada kesanggupan penerima pajak untuk menanggung tambah beban pajak, hingga sebagian besar beban pajak tidak akan ditanggung wajib pajak tidak mampu.
  - 8) Melindungi lingkungan. Pajak harus menjaga kelestarian lingkungan, artinya pemungutan pajak tidak akan memberi kesempatan pada daerah, pusat / wajib pajak untuk merusak lingkungan.

Menurut Perda No. 12 Th. 2018 Kota Semarang mengenai penyampaian laporan, administrasi dan pemantauan pajak daerah dengan sistem elektronik , adalah:

- 1) Menurut jenis pajak daerah yang dipungut oleh walikota sesuai dengan pasal 3 yaitu :
  - Pajak papan iklan
  - Pajak pertanahan dan air
  - Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan(PBBP2).
- 2) Menurut cara penghitungan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Jenis Pajak Daerah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, yaitu:
  - Pajak perhotelan
  - Pajak rumah makan
  - Pajak tempat hiburan
  - Pajak penerangan jalan-raya
  - Pajak mineral
  - Pajak parkir

- Pajak sarang burung walet
- Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### Sumber Penerimaan Pajak

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan UU No. 36 Th. 2008, PPh mengacu pada tingkat kemampuan dari wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luarnegeri, sehingga dapat digunakan untuk konsumtif / penambahan deviden dari wajib pajak, dengan nama atau bentuk apapun. Pajak pendapatan adalah pajak resmi pemerintah, yang dikeluarkan untuk mereka yang memiliki pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jenis PPh, antara lain :

- Pajak Penghasilan Final, yaitu PPh final (akhir) yang akan diberlakukan supaya tidak bisa dikreditkan dari total PPh yang terhutang diakhir tahun pajak.
- Pajak Penghasilan Pasal.21 adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak pribadi atas penghasilan yang bersangkutan dengan usaha, jasa atau kegiatan diantaranya yaitu gaji, tunjangan serta pembayaran lainnya.
- Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang di ambil oleh pemerintah daerah dan pusat, kelembagaan negara untuk penyerahan barang, dan oleh beberapa lembaga, baik negara maupun swasta, sehubungan dengan kegiatannya. dalam industri impor atau kegiatan komersial lainnya.
- PPh Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong dari pendapatan berasal dari Wajib Pajak dalam Indonesia (orang pribadi dan badan) dari tempat kerja yang melakukan kegiatan selain yang dikurangi dari modal, pemberian jasa atau PPh Pasal 21.

- PPh Pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dipungut dari Indonesia yang didapat dari 36 wajib pajak luar Indonesia selain Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Menurut UU No. 42 Th. 2009, PPN merupakan pajak yang diberikan karena penggunaan barang maupun jasa yang terkena di daerah pabean (diwilayah Indonesia). Perorangan, pengusaha serta pemerintahan yang menggunakan barang maupun jasa terkena pajak harus membayar PPN. Intinya, setiap jenis barang maupun jasa merupakan barang dan jasa terkena pajak, kecuali diatur oleh UU PPN.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  
Kecuali yang dikenai Pajak Penambahan Nilai, penggunaan barang-barang mewah terkena pajak dan terkena PPnBM. Barang-barang yang terkena pajak dengan golongan mewah diantaranya:
- Barang-barang itu tidak termasuk barang kebutuhan dasar
  - Barang-barang itu hanya dipakai oleh masyarakat tertentu
  - Barang hanya digunakan oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi
  - Barang itu dipakai guna menunjukkan derajat
  - Jika dipakai bisa membahayakan kesehatan dan kelakuan masyarakat, dan mengusik ketertiban.

#### 4) Bea Materai

Berdasarkan UU No.10 Th. 2020 terkait bea materai merupakan pajak atas dokumen. Dokumen yang telah dibuat/tertulis baik dalam tulisan tangan, cetakan atau elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti (kertas bukan kertas). Materai adalah cap dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lain, yang terdapat unsur

penjagaan yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai yaitu pajak yang diberikan atas penggunaan dokumen (seperti akta notaris, perjanjian, kwintansi pembayaran, surat berharga dengan nominalnya lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan). Dari tanggal 1 Januari 2021, bea materai tunggal sebesar Rp 10.000 akan dijalankan. Bea materai hanya digunakan untuk nominal dokumen melebihi dari Rp. 5 juta, dan nilai nominal yang di bawah Rp. 5 juta tidak ada bea materai yang dikenakan.

#### Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Sehingga ukuran penerimaan pajak merupakan tujuan dari perpajakan sendiri. Menurut Ilyas dan Burton (2013) tujuan perpajakan yaitu:

- Dana diberikan dalam bentuk pengeluaran sehari-hari, antara lain : pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji dan transfer pegawai, serta belanja nasional lainnya, yaitu bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat.
- Pembiayaan pengeluaran pembangunan meliputi pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur dan prasarana umum, jika terdapat surplus, akan digunakan untuk tabungan dan investasi pemerintah.

#### Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2017) mengemukakan, prosedur pungutan pajak yaitu:

##### 1. Stelsel Pajak

- Sistem pungutan pajak yang sebenarnya didasarkan pada objek aktual (untuk PPh, objeknya adalah pendapatan).

- Sistem virtual, pemungutan pajak didasarkan pada anggaran yang ditetapkan oleh UU.
  - Sistem campuran, pengumpulan pajak didasarkan pada perpaduan antara sistem nyata dan virtual.
2. Sistem Pemungutan Pajak :
- *Official Assessment System*, yaitu petugas pajak yang memberikan ketentuan dari kuantitas pajak yang harus dibayar tiap tahun sesuai UU perpajakan yang saat ini berlaku.
  - *Self Assessment System*, Sistem wajib pajak menentukan sendiri pajak tahunan terhutang sesuai undang-undang pajak yang berlaku.
  - *With Holding System*, yaitu pihak ketiga yang dipercaya memberikan ketentuan pajak terhutang oleh wajib pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu :

1. Wajib pajak mangkir dalam pembayaran pajak karena :
  - Pertumbuhan ideologis dan kelakuan masyarakat.
  - Sistem pajak sulit dipahami oleh wajib pajak / badan.
  - Sistem penjagaan tidak dilakukan dengan baik.
2. Semua usaha, tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak / badan untuk menghindari perpajakan. adalah :
  - *Tax avoidance*, tidak melakukan pelanggaran hukum untuk mengurangi beban pajak.
  - *Tax evasion*, melaukan pelanggaran hukum (korupsi pajak) agar berkurang beban pajak

## **PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

Menurut BPS Kota Semarang yaitu dalam kurun waktu tertentu, total nilai tambah semua barang maupun

jasa yang diproduksi didalam wilayah domestik suatu daerah karena berbagai kegiatan ekonomi, terlepas dari faktor produksi di wilayah tertentu.

Manfaat yang dapat diperoleh menurut Pandita, 2021 adalah:

- 1) PDRB yang dihitung pada harga sekarang (harga nominal) memberitahukan kapasitas sumber daya ekonomi yang diproduksi di suatu daerah. Jika nilai PDRB maka, semakin kuat kapasitas sumber daya ekonominya, begitu pula sebaliknya.
- 2) Harga konstan (aktual) PDRB bisa digunakan sebagai petunjuk tingkat pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahunan atau tingkat pertumbuhan total dari setiap kategori.
- 3) Harga PDRB saat ini menurut wilayah bisnis memperlihatkan struktur ekonomi suatu daerah. Indikator ekonomi yang berperan penting dalam menunjukkan basis ekonomi daerah.
- 4) PDRB per kapita yang dihitung dengan harga berlaku memperlihatkan nilai PDRB dan PNB masing-masing masyarakat.
- 5) PDRB per kapita yang dihitung dengan harga tetap membantu untuk memahami pertumbuhan ekonomi per kapita aktual dari populasi suatu daerah.

## **Pentingnya PDRB**

Penghitungan dan penyediaan data diharapkan bisa membagikan informasi mengenai kondisi ekonomi di suatu daerah, kemampuan dan peningkatan ekonomi daerah untuk mencukupi kebutuhan.

Data yang diberikan oleh PDRB bisa melihat kondisi ekonomi saat ini, termasuk struktur ekonomi masa lalu, situasi aktual saat ini, dan kemungkinan masa depan. Oleh karena itu, menurut Sania dkk, 2018 PDRB berfungsi sebagai berikut :

1) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Melihat persentase pertumbuhan PDRB atas harga konstan, kita bisa melihat tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral dan keseluruhan

2) Tingkat Kemakmuran

Pada umumnya diukur menggunakan pendapatan per kapita. Jika laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran tersebut tidak akan meningkat.

3) Tingkat Inflasi dan Deflasi

Membandingkan PDRB harga sekarang dengan PDRB harga tetap, yang bertujuan mengetahui tingkat kenaikan pajak dan penurunan pajak.

4) Struktur Perekonomian

PDRB departemen bisa digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian daerah, di sini bisa melihat data setiap departemen dari peran masing-masing departemen atau kontribusinya terhadap total pendapatan seluruh daerah. Oleh karena itu, hasil PDRB selalu perlu dilakukan penghitungan, karena sangat bermanfaat bagi para ahli di bidang perencanaan ekonomi (jangka pendek dan jangka panjang) serta mengambil keputusan ekonomi, peneliti dan akademisi dari instansi / pemerintah dan swasta, serta masyarakat.

5) Indikator Potensi Suatu Daerah

Dengan melihat peran departemen / keseluruhan Kabupaten di provinsi tersebut, kita dapat melihat potensi daerah, khususnya sektor produksi yang berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah..

**JUMLAH PENDUDUK**

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk yaitu semua orang yang tinggal di negara Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau yang telah tinggal kurang dari enam bulan tapi bertujuan untuk menetap. Jumlah

Penduduk, kuantitas penduduk yang banyak dapat menimbulkan beragam masalah, seperti kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

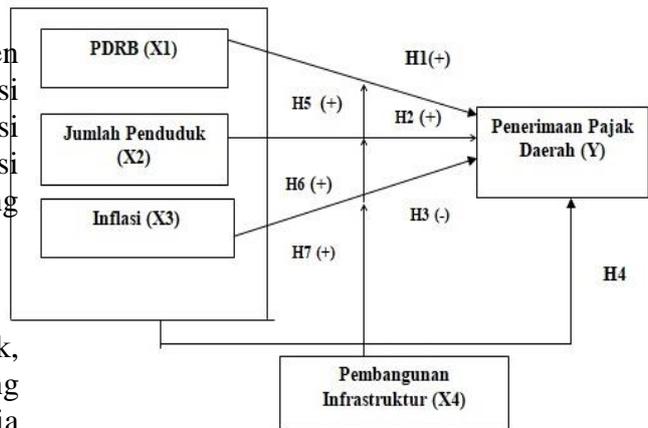
**INFLASI**

Inflasi diartikan sebagai peningkatan harga yang terus menerus secara keseluruhan selama periode waktu tertentu menurut BPS Kota Semarang. Jika peningkatan harga hanya satu/dua komoditas meluas dan tidak menyebabkan harga komoditas lain naik, tidak bisa disebut inflasi.

**Indikator Inflasi**

Menurut Nafi, 2019 indikator dipergunakan dalam pengukuran inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Fluktuasi IHK memperlihatkan adanya mobilitas harga barang / jasa yang digunakan masyarakat. Barang / jasa dalam IHK ditentukan berdasarkan survei pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Lalu BPS memantau tren harga barang serta jasa ke beberapa kota setiap bulannya di tiap kota dipasar tradisional maupun modern untuk melihat harga beberapa barang dan jasa di masing-masing kota.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber : Dikembangkan dari berbagai penelitian, 2020

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN**

1. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang.  
Penelitian yang dilakukan oleh Merissa Widyasari & Sugiarto (2015) telah membuktikan variabel PDRB **berpengaruh positif dan tidak signifikan** terhadap penerimaan pajak, Sania & Yunita, Muttaqin (2018) telah membuktikan PDRB **berpengaruh signifikan** terhadap pajak daerah, Puspita Suci Arianto & Yazid Yud Padmono (2014) telah membuktikan bahwa PDRB memiliki **pengaruh positif dan signifikan** terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, ditarik hipotesis sebagai berikut :  
**H<sub>1</sub> : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**
2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang  
Menurut penelitian dari Arianto & Yazid Yud Padmono (2014) telah membuktikan bahwa jumlah penduduk **berpengaruh positif dan penting** terhadap penerimaan pajak daerah, Putri (2013) telah membuktikan jumlah penduduk **berpengaruh signifikan** terhadap penerimaan pajak, dan Rina Tri Setiasih & Sebayang (2018) jumlah penduduk **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap perpajakan daerah. Maka dari itu, ditarik hipotesis sebagai berikut :  
**H<sub>2</sub> : Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**
3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Menurut penelitian Ilyas (2014) telah membuktikan inflasi **tidak berpengaruh negatif** terhadap penerimaan pajak daerah, Sania & Yunita, Muttaqin (2018) telah membuktikan inflasi **tidak berpengaruh signifikan** terhadap penerimaan pajak daerah, dan Gupita P & SBM (2013) menyatakan Inflasi mempunyai **pengaruh negatif** terhadap penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.**

4. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Menurut penelitian dari Ilyas (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi secara bersama-sama **berpengaruh positif** terhadap penerimaan pajak daerah. Sania dan Yunita, dan Muttaqin (2018) menyatakan total penduduk, PDRB, dan inflasi bersamaan **memiliki pengaruh yang positif** terhadap penerimaan pajak daerah. Putri (2013) menyatakan bahwa total penduduk, PDRB, dan inflasi bersamaan memberikan **pengaruh positif** pada penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, ditarik kesimpulan :

**H<sub>4</sub> : PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**

5. Pembangunan Infrastruktur Memperkuat Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Menurut penelitian Sumadiasa, Tisnawati, dan Wirathi (2018) menyatakan bahwa Pembangunan

Infrastruktur memiliki **pengaruh positif** terhadap pertumbuhan PDRB. Susanto, Fitriadi dan Gaffar (2017) menyatakan infrastruktur panjang jalan terhadap PDRB **berpengaruh positif signifikan**, Lianna, Muzdalifah dan Anshar (2020) menyatakan infrastruktur jalan **berpengaruh negatif tidak signifikan** terhadap PDRB. Oleh karena itu, ditarik hipotesis :

**H<sub>5</sub> : Pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**

6. Pembangunan Infrastruktur Memperkuat Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Menurut penelitian dari Arsandi, Wahyu R, Ismiyati, dan Hermawan (2017) menyatakan tingkat padat penduduk **memberikan pengaruh signifikan positif** pada perkembangan infrastruktur di Kota Semarang. Arsandi dan Wahyu R (2018) menyatakan tingkat padat penduduk **memberikan dampak yang signifikan positif** pada perkembangan infrastruktur di Semarang. Pane, Sumbiring dan Unsa (2012) menyatakan bahwa infrastruktur kesehatan **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk, semakin banyak ketersediaan infrastrukturnya. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan :

**H<sub>6</sub> : Pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**

7. Pembangunan Infrastruktur memperkuat Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azuwandri, retno Agustin, dan Sunoto (2019) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai **hubungan positif dan signifikan** terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertiwi (2019) menyatakan bahwa infrastruktur **tidak berpengaruh signifikan** terhadap inflasi. Atmaja dan Mahali (2013) menyatakan bahwa infrastruktur air mempunyai **pengaruh positif dan signifikan** terhadap inflasi. Oleh karena itu, ditarik hipotesis :

**H<sub>7</sub> : Pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang**

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Definisi variabel Penelitian semua yang dipelajari dalam bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2016)

### Variabel Dependen

Variabel dependen / terikat yaitu yang ukurannya dipengaruhi oleh variabel lain. (Sugiyono, 2016) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah (Y).

### Variabel Independen

Variabel independen / bebas yaitu variabel pengaruh atau alasan perubahan / timbulnya variabel dependen (terikat). Baik yang pengaruh positif maupun dampak negatif. (Sugiyono, 2016) Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah: PDRB ( $X_1$ ), jumlah penduduk ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ).

### Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang menentukan kuat atau lemahnya

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Ghozali, 2016). Adapun variabel moderating dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur ( $X_4$ ).

## JENIS DAN SUMBER DATA

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder kuantitatif. Data sekunder biasanya seperti bukti, dan laporan yang telah disusun dan diterbitkan. Diperoleh dari buku, jurnal, penelitian dan sumber data yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Data yang digunakan dikumpulkan dari tahun 2015-2019 secara *time series*.

## Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode diperoleh informasi dengan benda tertulis yang bisa didapat dari bermacam sumber jurnal, makalah, dan buku-buku terkait, untuk membantu penyusunan penelitian, termasuk laporan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Instansi yang terlibat antara lain BPS Kota Semarang, Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kota Semarang, APB, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang, LRA Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang. Data-data tersebut diharapkan bisa menjadi dasar ideologis untuk penelitian.

## Metode Analisis

Sugiyono (2012) mengemukakan pandangan bahwa analisis data mengacu pada suatu aktivitas setelah mengumpulkan data dari semua responden.

Adapun Uji yang digunakan adalah :

### 1. Uji *Descriptive*

Metode analisis statistik deskriptif dilakukan dengan bantuan program pengolahan data. Uji deskriptif bertujuan

untuk merangkum variabel pada penelitian. Statistik deskriptif memperlihatkan gambaran yang bisa dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *varians*, *maksimum*, *minimum*, *jumlah*, *range*, *kurtosis* dan *skewness*. (Ghozali, 2016)

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a) Normalitas Data (*Kolmogorov – Smirnov*)

Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel pengganggu / variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas data bisa dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

### b). Multikolonieritas

Yaitu untuk menguji model regresi menemukan korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas.

### C). Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu varians dari variabel pengganggu tidak konstan. Uji Glejser digunakan untuk menguji keseimbangan varians dari satu residual observasi ke residual observasi lainnya dalam model regresi. (Ghozali, 2016).

### b) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan perancu pada periode  $t-1$  sebelumnya pada model regresi linier.

## 3. Analisis Regresi dengan Uji Interaktif (MRA)

Analisis Regresi dengan Uji Interaktif (MRA)

### a) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel bebas (PDRB, jumlah penduduk dan inflasi) baik secara parsial maupun simultan terhadap

variabel terikat (penerimaan pajak daerah).

Rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sumber : Ghozali (2016)

#### b) Analisis Regresi Linier Berganda dengan MRA

Analisis MRA dipakai untuk mengetahui apakah pembangunan infrastruktur memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel bebas baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat.

*Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaktif merupakan aplikasi khusus dari regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresi tersebut mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas). Jika hasil perkalian dua variabel independen signifikan, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_4 + e$$

Sumber : Ghozali (2016)

#### 4. *Goodness Of Fit*

##### a) Uji t (Parsial)

Pengujian yang menunjukkan tingkat pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel dependen (Ghozali, 2016).

##### b) Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2016) Uji Simultan melihat semua variabel bebas yang dicantumkan dalam model regresi memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan metode uji signifikansi pada taraf 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Uji F ini menguji pengaruh semua variabel bebas untuk model regresi terhadap variabel terikat yang diuji,

dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Pengujian ini membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Bisa disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh riil terhadap nilai variabel terikat.

##### b) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Mengukur jauhnya kesanggupan model bisa menunjukkan variasi variabel terikat adalah tujuan dari koefisien determinan. Skala koefisien determinan yang rendah menjelaskan jika kesanggupan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen bebas, maka meningkatnya nilai koefisien determinan dengan mengacuhkan pengaruh signifikan atau tidaknya variabel bebas terhadap variabel terikat.

## METODE ANALISIS DATA

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang dipergunakan dalam penganalisaan data yang dipergunakan dalam penelitian dengan metodenya yaitu memberikan gambaran semua data yang dikumpulkan tanpa menggeneralisasikan kesimpulan secara umum. Dalam uji statistik deskriptif dari suatu data dapat diketahui pada nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum serta minimum (Ghozali, 2016).

**Tabel 5**  
*Descriptive Statistic*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	5	109,110.	140,326.	123,915.	12,387
Juml. Penduduk	5	1.648,279	1776,618	1685,277	52,020
Inflasi	5	,20	1.04	,5480	,32545
Pembangunan Infrastruktur	5	480,808	927,629	799,723	184,574
Pen.Pajak Dae.	5	816,208.	1561,698	579,314	796,024
Valid N (listwise)	5				

Pada hasil analisis pada tabel 5 dan Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada hasil dari nilai minimum terendah dimiliki oleh variabel Inflasi ( $X_3$ ) dengan nilai 0,20, sementara nilai tertinggi dimiliki oleh variabel Jumlah Penduduk ( $X_2$ ). Sedangkan dapat disimpulkan untuk nilai maksimum terendah terdapat pada Inflasi ( $X_3$ ) dan nilai tertinggi yaitu Jumlah Penduduk ( $X_2$ ). Pada nilai *mean* terendah terdapat pada variabel Inflasi ( $X_3$ ) dengan nilai 0,5480 serta *mean* tertinggi dimiliki oleh variabel Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) dengan nilai 1.685,277. Nilai *standard deviation* terendah dimiliki oleh Inflasi ( $X_3$ ) yaitu 0.32545 dan tertinggi dimiliki Penerimaan Pajak Daerah (Y) sebesar 796.024.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam hal ini uji asumsi klasik yang dilakukan oleh peneliti antara lain uji normalitas, multikolonieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

### a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, merupakan cara perbandingan data dengan distribusi normal baku.

**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
		X1	X2	X3	X4	Y
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	123,915	168,527	,5480	799,723	579,314
	Std. Deviation	123,874	520,200	,32545	184,574	796,024
Most Extreme Differences	Absolute	,150	,383	,207	,352	,366
	Positive	,150	,383	,207	,244	,366
	Negative	-,125	-,238	-,142	-,352	-,234
Test Statistic		,150	,383	,207	,352	,366
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>d</sup>	,056 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,052 <sup>c</sup>	,077 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.						
b. Calculated from data.						
c. Lilliefors Significance Correction.						
d. This is a lower bound of the true significance.						

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada Tabel 5 menggambarkan dari

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	5	109,110.	140,326.	123,915.	12,387
Juml. Penduduk	5	1.648,279	1776,618	1685,277	52,020
Inflasi	5	,20	1.04	,5480	,32545
Pembangunan Infrastruktur	5	480,808	927,629	799,723	184,574
Pen.Pajak Dae.	5	816,208.	1561,698	579,314	796,024
Valid N (listwise)	5				

semua variabel pada penelitian ini mempunyai nilai probabilitas lebih dari 0,05, kesimpulannya populasi memberikan kontribusi normal, dengan nilai masing-masing variabel PDRB : 0,150, Jumlah Penduduk : 0,383, Inflasi : 0,207, Pembangunan Infrastruktur : 0,352 dan Penerimaan pajak daerah : 0,366.

### b) Uji Multikolonieritas

Pada prinsip Uji multikolonieritas dilakukan agar dapat mengetahui terjadi tidaknya korelasi beberapa variabel atau semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian untuk model dari regresi yang dipakai.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

No	Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	PDRB ( $X_1$ )	,734	1,362	Bebas Multikol
2.	Jumlah Penduduk ( $X_2$ )	,237	4,223	Bebas Multikol
3.	Inflasi ( $X_3$ )	,257	3,898	Bebas Multikol

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada Tabel 6 hasil dari nilai *tolerance* diketahui mendapatkan nilai lebih besar dari 0,10, dengan itu maka tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini serta nilai VIF jauh dibawah

angka 10, sehingga pada uji ini diketahui tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

**c) Uji Heteroskedastisitas**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-228,7818	199,8563		-1,145	,457
	X1	395,2027	2761,482	,667	1,431	,388
	X2	119,3285	1157,866	,845	1,031	,490
	X3	-247,0510	1778,0933	-1,095	-1,389	,397

Dependent Variable: ABSResid

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021  
Berdasarkan Tabel 7 memberikan gambaran nilai dengan signifikansi semua variabel bebas lebih besar dari 0,05, maka dapat menarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, dimana nilai signifikansi variabel PDRB : 0,388, jumlah penduduk : 0,490 serta inflasi : 0,397. Pada nilai signifikansi dengan hasil lebih besar daripada 0,05.

**4. Uji Autokorelasi**

Dalam Uji Autokorelasi dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi diantara variabel penelitian di dalam model prediksi dengan perubahan waktu, dengan ketentuan yaitu batas tidak terjadi autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai +2 (Ayunda, 2015).

**Tabel 8**  
**Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,919	227,226	1,481
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada tabel 8 diketahui bahwa hasil pada kolom *Durbin-Watson* menunjukkan angka 1,481, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai berada diantara rentang skala -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian bebas dari Autokorelasi.

**5. Analisis Regresi**

**a) Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi dengan variabel terikat yaitu penerimaan pajak daerah.

**Tabel 9**  
**Uji Regresi Tahap 1**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,287	,774	
	X1	,675	,703	,751
	X2	,995	,802	,847
	X3	-.153	,209	-.629

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada tabel 9 dapat diketahui hasil *output* regresi sehingga persamaan uji regresinya, yaitu :

$$Y = 0,287 + 0,675 X_1 + 0,995 X_2 - 0,153 X_3 + e$$

**2) Analisis Regresi Berganda dengan MRA**

*Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu sebuah aplikasi yang khusus pada regresi linier berganda, dengan didalamnya terdapat persamaan regresi yang mengandung unsur interaksi, (perkalian dua atau lebih variable independen).

**Tabel 10**  
**Uji Regresi Tahap 2 Moderate 1**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,761	,278	
	X1	,604	,248	4,941
	X4	,196	,345	4,566
	Moderate1	,118	,050	5,732

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Persamaan uji regresi tahap 2 dengan moderate 1 yaitu :

$$Y = 0,761 + 0,604 X_1 + 0,196 X_4 + 0,118 X_1 X_4 + e$$

**Tabel 11**  
**Uji Regresi Tahap 2 Moderate 2**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,272	,513	
	X2	,437	,267	,900
	X4	,187	,322	,778
	Moderate2	,081	,005	,215

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Pada tabel 11 didapatkan persamaan uji regresi tahap 2 moderate 2 adalah :

$$Y = 0,272 + 0,437 X_2 + 0,187 X_4 + 0,081 X_2 X_4 + e$$

**Tabel 12**  
**Uji Regresi Tahap 2 Moderate 3**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,177	,256	
	X3	,163	,265	,6
	X4	,324	,303	,7
	Moderate3	,053	,332	,6

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada tabel 12 dapat diketahui persamaan regresi tahap 2 moderate 2 yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,177 + 0,163 X_2 + 0,324 X_4 + 0,053 X_3 X_4 + e$$

## 5. Pengujian Goodness of Fit

Pengujian *goodness of fit* digunakan secara parsial (uji t) maupun simultan (uji F).

### a) Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial terhadap variabel terikat.

**Tabel 13**  
**Uji t Regresi Tahap 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,287	,774		3,716	,007
	X1	,675	,703	,751	6,311	,000
	X2	,995	,802	,847	6,887	,012
	X3	-.153	,209	,629	-2,232	,028

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

### a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pada variabel PDRB memiliki t hitung 6,311 yang berarti lebih besar dari t tabel 2,015 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 serta dengan arah yang positif. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang pertama bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang dan dapat diterima.

### b. Pengujian Hipotesis Kedua

Pada variabel Jumlah penduduk didapatkan hasil t hitung sebesar 6,887 sehingga nilai tersebut lebih besar daripada t tabel 2,015 dengan signifikansi 0,012 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 dan dengan arah yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan

pajak daerah Kota Semarang dan dapat diterima.

### c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pada variabel Inflasi didapatkan hasil t hitung sebesar -2,232 sehingga nilai tersebut lebih kecil daripada t tabel 2,015 dengan signifikansi 0,028 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 dan dengan arah yang negatif negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang dan dapat diterima.

### 3. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Uji signifikansi parameter simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada penelitian ini, secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat.

**Tabel 14**  
**Uji F Regresi Tahap 1**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	248,2988	3	827,6627	511,030	,008 <sup>b</sup>
	Residual	516,3173	1	516,317		
	Total	253,4619	4			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

### d. Pengujian Hipotesis Keempat

Pada nilai F hitung regresi tahap 1 didapatkan nilai sebesar 511,030 sehingga lebih besar daripada nilai F tabel 216 dengan signifikansi 0,008 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 serta dengan arah yang positif, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa PDRB, jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang dan dapat diterima.

### e. Pengujian Hipotesis Kelima

**Tabel 15**  
**Uji t Regresi Tahap 2 Moderate 1**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,761	,278		7,734	,009
	X1	,604	,248	4,941	7,237	,022
	X4	,196	,345	4,566	4,257	,011
	Moderate1	,118	,050	5,732	5,530	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Nilai t hitung dari variabel PDRB, pembangunan infrastruktur dan moderate 1 pada regresi tahap 2 moderate 1 masing-masing nilainya adalah 7,237 , 4,257 dan 5,530 sehingga nilai tersebut lebih besar dari t tabel 2,015 serta signifikansinya masing-masing 0,022, 0,011 dan 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 dan dengan arah positif semua. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kelima yang menyatakan pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh dari PDRB terhadap penerimaan pajak daerah dan dapat diterima.

### f. Pengujian Hipotesis Keenam

**Tabel 16**  
**Uji t Regresi Tahap 2 Moderate 2**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,272	,513		4,530	,009
	X2	,437	,267	,900	5,515	,008
	X4	,187	,322	,778	4,119	,000
	Moderate2	,081	,005	215	4,695	,005

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada nilai t hitung dari variabel jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur dan moderate 2 pada regresi tahap 2 moderate 2 masing-masing nilainya adalah 5,515, 4,119 dan 4,695 yang berartilebih besar daripada t tabel 2,015 serta signifikansinya masing-masing 0,08, 0,00 dan 0,005 lebih kecil daripada 0,05 dan dengan arah yang positif semua. Dapat disimpulkan hipotesis keenam yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah dan dapat diterima.

### g. Pengujian Hipotesis Ketujuh

**Tabel 17**  
**Uji t Regresi Tahap 2 Moderate 2**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,177	,256		4,069	,006
	X3	,163	,265	,668	5,061	,001
	X4	,324	,303	,753	4,107	,032
	Moderate3	,053	,332	,619	4,085	,046

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Pada nilai t hitung inflasi, pembangunan infrastruktur dan *moderate* 3 pada regresi tahap 2 *moderate* 3 masing-masing nilainya adalah 5,061, 4,107 dan 4,085 sehingga nilai tersebut lebih besar dari t tabel 2,015 serta signifikansinya masing-masing 0,001, 0,032 dan 0,046 lebih kecil daripada 0,05 dan dengan arah yang positif semua. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dapat diterima.

### 6. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Dalam pengujian Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel penelitian yaitu PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan *moderate* dalam menerangkan variasi variabel dari berbagai bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian.

**Tabel 18**  
**Koefisien Determinasi Regresi Tahap 1**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,919	227,226	1,481

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021  
Analisis :

Berdasarkan Tabel 18 diketahui *Adjusted R<sup>2</sup>* regresi tahap 1 dengan nilai sebesar 0,919 yang berarti variasi variabel penerimaan pajak daerah Kota

Semarang bisa dijelaskan oleh variable PDRB, jumlah penduduk dan inflasi sebesar 0,919 atau 91,9%, sedangkan sisanya sebesar 8,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

**Tabel 19**  
**Koefisien Determinasi Regresi Tahap 2 Moderate 1**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 <sup>a</sup>	,901	,606	499,6907	1,788

Predictors: (Constant), Moderate1, X1, X4

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021  
Analisis :

Pada Tabel 19 diketahui bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* regresi tahap 2 *moderate* 1 nilainya sebesar 0,606 yang berarti variasi variabel penerimaan pajak daerah Kota Semarang bisa dijelaskan oleh variabel PDRB, pembangunan infrastruktur dan *moderate* 1 sebesar 0,606 atau 60,6%, sedangkan sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh variable lain diluar model.

**Tabel 19**  
**Koefisien Determinasi Regresi Tahap 2 Moderate 2**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,490 <sup>a</sup>	,540	,520	981,5447	1,116

Predictors: (Constant), Moderate2, X2

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021  
Analisis :

Pada Tabel 19 diketahui bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* regresi tahap 2 *moderate* 2 didapatkan nilai sebesar 0,520 yang berarti variasi variabel penerimaan pajak daerah Kota Semarang dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur dan *moderate* 2 sebesar 0,520 atau 52%, sedangkan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

**Tabel 20**  
**Koefisien Determinasi Regresi Tahap 2 Moderate 3**

Model Summary					
odel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,398 <sup>a</sup>	,558	,599	146,0820	1,99
. Predictors: (Constant), Moderate3, X4, X3					

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Analisis :

Pada Tabel 20 diketahui bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* regresi tahap 2 *moderate 3* nilainya sebesar 0,599 yang artinya variasi variabel penerimaan pajak daerah Kota Semarang dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, pembangunan infrastruktur dan *moderate 3* sebesar 0,599 atau 59,9%, sedangkan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Peningkatan PDRB akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Semarang, karena PRDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Semarang.
2. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak Kota Semarang, karena jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Semarang.
3. Peningkatan inflasi akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak daerah Kota Semarang, karena inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
4. Peningkatan PDRB, jumlah penduduk dan inflasi secara simultan akan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Semarang, karena PDRB, jumlah penduduk dan inflasi secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Semarang.
5. Pembangunan infrastruktur memoderasi pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Artinya pembangunan

infrastruktur memperkuat pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak Kota Semarang.

6. Pembangunan infrastruktur memoderasi pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Artinya pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.
7. Pembangunan infrastruktur memoderasi pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Artinya pembangunan infrastruktur memperkuat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis data serta kesimpulan, maka ada beberapa saran yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi penentu kebijakan di Pemerintahan Kota Semarang, antara lain adalah :

1. Jumlah penduduk memberikan pengaruh terbesar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang bila dibandingkan dengan PDRB dan inflasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka bagi pihak-pihak yang terkait yaitu instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak daerah Kota Semarang perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang intinya dapat menyadarkan masyarakat untuk tertib dalam membayar pajak, karena dengan tingkat kesadaran warga yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka penerimaan pajak pun akan semakin meningkat.
2. Inflasi memberikan pengaruh paling kecil terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan PDRB. Penentu kebijakan di Pemerintahan Kota Semarang perlu membuat

terobosan-terobosan baru untuk dapat menekan inflasi seminimal mungkin.

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian 1 saja, yaitu Kota Semarang, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan bagi semua permasalahan, karena hanya mendeskripsikan keadaan PDRB, jumlah penduduk, inflasi, pembangunan infrastruktur dan penerimaan pajak daerah di Kota Semarang saja.
2. Keterbatasan pada variabel independen yang dipakai untuk mengukur penerimaan pajak di Kota Semarang, yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriany, Dian dkk 2018, Analisis Hubungan Antara Infrastruktur Jalan Dan *Tax Capacity* : Studi Kasus Indonesia, *Journal Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Indonesia*
- Astriyani, Lilis 2016, Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Journal Ilmu Ekonomi*
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020, Data Inflasi Kota Semarang 2015-2014, Semarang.
- Derwanto, Erlangga 2017, Analisa Faktor-Faktor Penentu Penghindaran Konsumen Terhadap Personalized Advertising. *Journal management*
- Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2018. Perhitungan Potensi Pajak Daerah.
- Dr. Kamaroellah, M.Si dan Dr. Farahdilah Kutsiyah, 2018, *Buku isu-isu strategi makro ekonomi*, Jakarta
- Fahmi, Anisa 2019, Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan, *Journal Politeknik Keuangan Negara STAN. Vol. 6 No.1*
- Pemerintah Kota Semarang, 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 Dan 2014*. Semarang
- Pemerintah Kota Semarang, 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 Dan 2015*. Semarang
- Pemerintah Kota Semarang, 2015.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelaporan, Pembayaran Dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik
- Purnama Sari, Dian dan Fitriawati Ilyas 2016, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu, *Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*
- Sania, Hidayati dkk 2018, Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa

- Tengah, *journal fakultas ekonomi Universitas Pancasila. Vol. IX No.2*
- Santoso, Setyawan 2017. *Bahan Ajar Bank Indonesia*. Jakarta
- Sudjana, Saputra dan Djudi, 2014. *Inflasi* . Jakarta
- Sundari, Baratrima Melly Agustiningrum 2016 pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Di Provinsi Jawa *Journal Ilmu Ekonomi*
- Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang bea materai
- Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan
- Widyasari, Merissa dan Sugiarto, 2016, Analisis *Error Correction Mechanism* (ECM) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Indonesia, *Journa*